

PERAN HUMAS PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DALAM PENGELOLAAN ISI INFORMASI *WEBSITE* PEMDA SEBAGAI *MEDIA COMMUNICATIONS RELATIONS* DENGAN MASYARAKAT

Meilyna Diah Anggrahini / Christina Rochayanti / Edwi Arief Sosiawan
Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta
Jl. Babarsari No. 2 Yogyakarta
Telp. (0274) 485268

Abstract

Human relation is an integral part of an organization or company since all of activities conducted is intended to create organizations or companys positive image before the public. For creating such positive image to the existing role of human relations in the management of informational contents of regional government’s website as media of communications relation with society. Human relations has role as communication fasilitatos i.e legal practisioner behaving as communicator or mediator to create two why or reciprocal communication between the organization or company and its public though online media.

The purpose of this reseach was to know the role of human relations of regional Government of Sragen Regency in management of informational content in Regional Government’s website as communications relations with society in Regional Government of Sragen Regency. This reseach used descriptive qualitative reseach method. Technique of data collection was conducted by interview, observation and literal study.

The result of this research suggests that human relation of Regional Government of Sragen Regency has role in organisational management in management process of informational contents contained in Regional Government’s website. Human relations strives to fulfill social demand to gain information on all policies, program and activated conducted by government. However, active participations of society is still felt as lack. Communication relations relate between government and society through online media has not been conducted optimally. There is still few amount of society that knows Regional Government’s website. Society only takes the advantages of website merely for gaining information. Thus, human relation keeps maintaining the use of conservative media as medium for conveying information to the cociety.

Keywords : *human relation, communication relation, media on line*

Pendahuluan

Globalisasi di segala bidang menjadikan semakin terbukanya saluran informasi dan komunikasi. Masyarakat semakin mudah memperoleh informasi atas segala kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kondisi tersebut menuntut transparansi dan harus dapat mengakomodasikan aspirasi masyarakat sehingga tujuan mewujudkan masyarakat demokratis dapat tercapai.

Nilai-nilai demokrasi antara lain ditandai oleh keterbukaan informasi, kebebasan informasi, dan kebebasan pers. Semuanya itu telah menjadi fenomena global. Fenomena global itu membawa konsekuensi pada pengakuan terhadap hak atas informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perangkat perundang-undangan di bidang informasi, komunikasi dan media massa juga semakin menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, sehingga

pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, sejalan dengan pengembangan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Otonomi daerah adalah hasil dari era reformasi dan demokratisasi yang memberikan kewenangan dan peluang yang sangat luas bagi daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi di sisi lain otonomi daerah juga merupakan tantangan yang menuntut tiap-tiap daerah untuk selalu mengembangkan inovasi, strategi dan ide-ide baru untuk menghadapi tantangan persaingan regional dan global yang semakin meningkat.

Seiring dengan hal tersebut, saat ini mulai tumbuh dengan apa yang disebut *electronic government (egov)* sebagai implementasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Perkembangan *ICT (Information and Communication Technology)* yang semakin pesat harus disikapi sebagai peluang dan tantangan yang perlu diantisipasi dengan jalan menyiapkan perangkat dan sistem jaringan teknologi informasi yang dapat dengan mudah diakses dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal serta semakin besarnya tuntutan demokratisasi dan semakin transparannya akses informasi perlu disikapi dengan cepat dan tepat. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah tetap mendapatkan kredibilitas, sehingga masyarakat mudah diajak berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan nasional. Pemerintah Daerah dituntut dapat memberikan pelayanan publik dengan memenuhi kriteria *better, cheaper, dan faster*. Selain itu diperlukan media yang mudah diakses, sehingga masyarakat sewaktu-waktu dapat mengetahui apa saja kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam rangka ikut berpartisipasi, baik dalam bentuk dukungan, sanggahan, maupun kritikan.

Realitas penggunaan *ICT* di lingkungan pemerintahan memunculkan istilah *egovernment* yang dalam beberapa kasus berhasil memberikan banyak nilai positif yang menggembirakan. Pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat,

mudah dan murah seperti yang selama ini diharapkan masyarakat. Aktivitas pemerintahan pun menjadi efektif dan efisien. Tetapi sebaliknya, penerapan *egovernment* yang kurang berhasil justru menimbulkan beberapa kasus. Hal ini disebabkan karena belum dipahaminya secara komprehensif peranan *ICT* dalam komunitas tertentu serta kurangnya persiapan aparatur pemerintah dan rendahnya pengetahuan masyarakat. Beberapa kendala terhadap penerapan *egovernment* di berbagai daerah diantaranya, Peraturan seputar *egovernment* yang cenderung masih lemah. Misalnya Inpres No. 3/2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan *egovernment*. Dari inpres tertanggal 9 Juni 2003 itu, hanya ada satu juklak yang diturunkan, yakni standarisasi penerapan *egovernment*. Sementara *Cyber Law (UU Informasi dan Transaksi Elektronik)* juga belum ada, ini mengakibatkan tahapan ketiga *e-government*, yaitu transaksi menjadi terhambat. Lembaga yang menangani *e-government* di Indonesia, Depkominfo juga tidak mempunyai "kaki" di daerah sehingga menyulitkan upaya koordinasi untuk pengembangan *egovernment*. Kasus lain yaitu belum adanya pemahaman yang tepat mengenai esensi *egovernment* dikarenakan lemahnya sisi sumber daya manusia (SDM). Yang paling menonjol adalah belum siapnya SDM di kalangan pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada akhirnya, hal ini menciptakan ketidakharmonisan pemahaman mengenai *egovernment*.

Pemerintah kabupaten Sragen, salah satu Kabupaten yang telah menerapkan *egovernment* secara penuh. Penerapan *egovernment* di Kabupaten Sragen banyak menjadi rujukan pemda-pemda lain dan menjadi *pilot project* contoh implementasi *e-government* di seluruh Indonesia. Salah satu wujud penerapan *egovernment* di Kabupaten Sragen adalah terbentuknya *website* resmi pemkab Sragen sejak tahun 2002. Situs *web* pemerintah daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan *egovernment*. Melalui *website Sragen News Online* yang beralamatkan di <http://www.sragenkab.go.id> masyarakat dapat memperoleh informasi lengkap

mengenai profil dan potensi kabupaten Sragen yang terdiri dari 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan serta sarana interaktif aparat dan masyarakat. *Website* dipercaya dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam penyebaran maupun sebagai sumber informasi serta potensi suatu organisasi. Sehingga setiap organisasi dapat meningkatkan publikasi dengan menggunakan media yang lebih *visible* di dunia yaitu portal informasi.

Website dapat menyediakan gambaran yang lebih lengkap tentang kegiatan, layanan dan potensi mengenai organisasi/lembaga yang bersangkutan. Dengan adanya fasilitas yang lebih lengkap tersebut, memungkinkan *Website* untuk menawarkan layanan *real time*, pengambilan informasi yang lebih cepat, penawaran jasa, di mana opsi ini tidak tersedia pada layanan tradisional.

Prestasi Pemerintah Kabupaten Sragen juga didapatkan dari *web* Pemerintah Kabupaten Sragen yang beberapa kali mendapat anugerah dari majalah warta ekonomi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sragen juga menerima beberapa penghargaan diantaranya Citra Pelayanan Prima 2004 oleh Presiden RI, Suara Merdeka *Otonomi Award* 2006, *Leadership award* dari Menpan (Kementerian Aparatur Negara), Penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara sebagai Pemerintah Kabupaten yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik 2006 diakses melalui (www.sragenkab.go.id)

Prestasi-prestasi yang didapat tersebut, tidak lepas dari peran beberapa pihak. Di antaranya Humas Pemda setempat bersama kantor bagian Pengelolaan Data Elektronik (PDE). Humas Pemda memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan isi informasi (*content website* Pemda. Hal ini sesuai dengan tugas Humas yaitu menangani di bidang komunikasi, informasi dan kehumasan pemerintah. Bagian Humas menjadi pelayan di bidang informasi yang sarannya meliputi audiens internal dan eksternal. Dengan demikian, Humas Pemerintah Daerah Sragen terus membangun sistem komunikasi dua arah di antara aparatur pemerintahan sendiri (staf dan pengambil keputusan), serta antara pemerintah dan masyarakat dengan menghidupkan partisipasi

komunikatif masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam menjalankan *communications relations* dengan masyarakat adalah dengan ikut mengelola isi informasi (*content*) yang dimuat dalam *website* ini. Adapun peran humas dalam pengelolaan *website* adalah dengan melakukan berbagai liputan, pengolahan berita hasil liputan, penyeleksian berita apakah berita yang ditulis layak dimuat dalam *website* atau tidak, hingga melakukan evaluasi mengenai berita yang telah dimuat apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Informasi adalah milik publik/masyarakat yang disebut hak memperoleh informasi. Dengan demikian bagian Humas wajib memperlakukan informasi sebagai aset untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warga masyarakat yaitu salah satunya dengan menggunakan *website* sebagai medianya.

Tinjauan Pustaka

Humas dalam pemerintahan berbeda halnya dengan humas yang berada dalam instansi non pemerintahan. Tetapi humas pemerintahan daerah pada hakikatnya sama saja dengan humas pemerintahan pusat dalam hal pengorganisasian dan mekanisme kerja. Perbedaannya hanya terlihat dari ruang lingkupnya saja tetapi yang penting ialah terlaksananya fungsi dan tercapainya tujuan humas sebagai penerapan konsep ilmu pengetahuan.

Dasar pemikiran humas dalam pemerintahan berdasarkan pada dua fakta dasar. Pertama, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui; karena itu, para pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab guna memberi penjelasan kepada masyarakat. Kedua, ada kebutuhan bagi para pejabat untuk menerima masukan dari masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan social, untuk memperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat. Hanya dengan proses komunikasi demikianlah pemerintah dan para pemilih dapat mencapai suatu pengertian kesatuan yang positif. (H. Frazier Moore, 1993:489).

Keberadaan humas dalam organisasi pemerintah sangat penting sebagai penyampaian informasi atau kebijaksanaan dari pemerintah

kepada publik dalam rangka mendapat dukungan dari publik mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan maupun kebijaksanaan pemerintah.

Dalam setiap organisasi diperlukan adanya publik untuk mengetahui sejauh mana organisasi itu berkembang. Sebagai lembaga pemerintah, instansi-instansi pemerintah memerlukan dukungan masyarakat untuk mendukung kebijaksanaan yang dibuat, selain itu dukungan itu diperlukan untuk mensukseskan program pemerintah karena tanpa dukungan maka penilaian orang tentang tindakan pemerintah dapat merugikan pemerintah. (Susanta dalam Ade Chusnul 2003:33)

Humas Pemerintahan memiliki dua tugas yaitu : pertama, menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan, perencanaan dan hasil yang telah dicapai; Kedua, menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-undangan dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari. Selain itu adalah tugasnya pula menasehati pimpinan departemen dalam hubungannya dengan reaksi atau tanggapan public terhadap kebijaksanaan yang dijalankan. (Onong Uchjana Effendy, 2002:37)

Adapun tugas kehumasan pemerintah menurut Susanto, yaitu : (1) tugas strategis humas adalah ikut serta dalam *decision making process*. (2) tugas taktis yaitu memberikan informasi, memberikan motivasi, menjalankan komunikasi timbal balik, membuat citra baik. Tugas taktis humas disebut juga mengamankan kebijaksanaan pemerintah supaya dapat menjalankan tugas taktis secara baik, maka tugas strategis perlu dimiliki oleh humas, mengingat humas mempunyai fungsi sebagai juru bicara dan koordinator lalu lintas informasi dengan masyarakat. Humas akan selalu dapat mengetahui latar belakang dari kebijaksanaan dan keputusan yang diambil.

Selain tugas-tugas yang harus dilaksanakan dengan baik, humas pemerintahan juga mempunyai tujuan yang harus dicapai, yaitu; (1) untuk mempertahankan hubungan baik antar instansi, (2) untuk memberikan keterangan-keterangan agar masyarakat mengetahui apa yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah (Chandor dalam Susanto dalam Ade Chusnul 2003 : 33). Selain itu humas pemerintah daerah juga memiliki empat tujuan

yakni : (1) Memelihara penduduk agar tahu jelas mengenai kebijaksanaan lembaga beserta kegiatannya sehari-hari. (2) Memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pandangannya mengenai proyek baru yang penting sebelum lembaga mengambil keputusan. (3) Memberikan penerangan kepada penduduk mengenai cara pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dan mengenai hak-hak dan tanggungjawab mereka. (4) Mengembangkan rasa bangga sebagai warga Negara. Sam Black (dalam Onong Uchjana Effendy 2002 : 39-40).

Untuk mencapai tujuannya, humas pemerintah diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi tersebut menurut Mordecai, antara lain : (1) mengimplementasikan kebijaksanaan publik, (2) membantu media dalam memberitakan pemerintah, (3) melaporkan pada publik mengenai aktivitas organisasi tersebut, (4) meningkatkan kebersamaan dalam organisasi, (5) meningkatkan sensitivitas organisasi terhadap publiknya, (6) memberikan dorongan kepada organisasi itu sendiri. (Cultip, Center, Broom, 1985 : 567).

Sebagai pintu informasi, humas berfungsi sebagai tempat keluar dan masuknya berbagai informasi dari dan untuk masyarakat. Berbagai kebijakan dari pemerintah disosialisasikan melalui humas. Begitu pula berbagai informasi dan masukan dari masyarakat diserap oleh humas untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan selaku penentu kebijaksanaan. Jadi humas dapat dikatakan mempunyai fungsi sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Apabila fungsi manajemen tidak berjalan sebagai mana mestinya, maka berbagai kebijaksanaan pemerintah tentu akan sulit di sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga dapat menimbulkan *mis-informasi* atau bahkan *dis-informasi*. Untuk itu hubungan antara instansi pemerintah dengan instansi lain dan antara pemerintah dengan masyarakat perlu senantiasa dijaga.

Untuk dapat mencapai sasaran organisasi seefisien mungkin maka humas mengadakan kegiatan-kegiatan. Kegiatan humas pemerintah menurut Rachmadi adalah ; (1) membina pengertian khalayak atas kebijakan instansinya, (2)

menyelenggarakan dokumentasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan instansinya, (3) memonitor dan mengevaluasi tanggapan dan pendapat umum masyarakat dalam kegiatan ini, humas harus melakukan komunikasi dan membina hubungan baik dengan masyarakat, (4) mengumpulkan data dan informasi, (5) mengkoordinasikan lalu lintas informasi di dalam lingkungan instansinya, (6) mengatur penyelenggaraan konferensi pers, *press tour*, *press interview* dengan pimpinan. (Rachmadi, 1993 : 82-83).

Humas pemerintah pada dasarnya tidak mempunyai sesuatu yang diperjual belikan, penggunaan teknik periklanan dan publisitas terbatas pada menyadarkan masyarakat atau khalayak akan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan instansi bersangkutan. (Susanto dalam Ade Chusnul, 2003 : 35)

Pendapat di atas menjelaskan bahwa adanya perbedaan antara humas yang terdapat pada organisasi pemerintah dengan humas pada lembaga non pemerintah. Humas pada lembaga pemerintah bertujuan menyampaikan informasi atau kebijaksanaan pemerintah kepada khalayak intern yaitu para karyawan yang ada dalam instansi pemerintahan tersebut dan khalayak ekstern yaitu instansi-instansi lain serta masyarakat umum, sedangkan pada humas organisasi non pemerintah cenderung menjual produk yang ada dalam perusahaan tersebut.

Relationship Management Theory

Perhubungan (*Relationship*) adalah sebuah perubahan perhubungan. Interaksi harus saling menguntungkan jika ingin tetap berlanjut. Humas menggunakan komunikasi untuk meyakinkan adanya hubungan yang saling menguntungkan. *Relationship management theory* memberikan sedikit pengetahuan, ukuran-ukuran dan model-model, mengizinkan para praktisi untuk mengevaluasi *relationship* antara organisasi dengan pasar, para pendengar dan publik serta untuk melacak perkembangan dan peningkatannya dan dapat menentukan kualitas dari *relationship* yang terbina meskipun *relationship* tersebut sedang berkembang. Ukuran kunci suksesnya *relationship* adalah kepercayaan, keterbukaan, mampu dipercaya, keseriusan, persamaan,

kesegaran, persetujuan, ketepatan.

Relationship management theory mencebarkan pertumbuhan dalam hal Humas untuk mengelola hubungan antara organisasi dengan pasar, para pendengar, dan publik/massa (MAP). Perhubungan menjadi inti dari humas dan didefinisikan sebagai hal yang mampu bertahan (eksis) di antara sebuah organisasi dan publiklah yang menjadi kunci dalam aksi (tindakan) yang nantinya dapat juga berpengaruh pada ekonomi, sosial, budaya atau politik.

Perhubungan (*relationship*) dikelola melalui komunikasi di antara organisasi dan pasar, para pendengar, dan publik. Humas menjadi sumber strategi untuk mengelola perhubungan (*relationship*). Kesuksesan atau kegagalan dari humas kemudian diukur dengan kualitas perhubungan organisasi dengan pasar, para pendengar, dan publik. (ledingham dalam Roberth, Timoyhy 2005 : 202).

Salah satu tugas humas dalam menjaga hubungan baik dengan para stakeholdersnya yaitu stakeholders eksternal pada komunitas masyarakat sekitar lingkungan perusahaan.

Menurut Peak, hubungan dengan komunitas, sebagai fungsi hubungan masyarakat, merupakan partisipasi suatu lembaga yang berencana, aktif dan sinambung dengan dan didalam suatu komunitas untuk memelihara dan membina lingkungannya demi keuntungan kedua pihak, lembaga dan komunitas. (Onong Uchjana Effendy, 2002 :114)

Definisi Peak tersebut, menunjukkan bahwa hubungan dengan komunitas berorientasi kepada kegiatan (*action oriented*) yakni kegiatan yang dilakukan oleh lembaga, dalam hal ini humaslah yang menjadi pelaksananya yang berperan sebagai partisipatif. Dengan partisipatif itu, maka keuntungan bukan hanya pada lembaga saja, tetapi juga pada lingkungan sekitarnya.

Untuk menjalankan perannya dengan baik, humas perlu memahami apa yang diharapkan komunitasnya. Hubungan yang baik menurut Marston tidak dapat dibangun hanya dalam semalam. Hubungan yang wajar, fair, jujur, terbuka dan saling menguntungkan tidak dapat selalu dipelihara. Hal inilah merupakan tugas dan peran humas untuk selalu konsisten menjaga hubungannya

dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut humas harus mempunyai program kerja yang bisa menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar. Dan tentunya perlu kepekaan terhadap lingkungan untuk membuat program yang sekiranya dapat menarik minat masyarakat.

Hal tersebut sekarang yang sedang diupayakan oleh pemda Kabupaten Sragen. Melalui media *online website* Pemda, pemerintah daerah kabupaten Sragen mengharapkan adanya interaksi dari masyarakat, memberi masukan berupa kritikan dan saran kepada pemerintah melalui jaringan *online* yang sudah disediakan. Pemda kabupaten Sragen sudah memberikan informasi kepada masyarakat dan publik, dan humaslah yang mempunyai peranan dalam penyampaian informasi tersebut. Melalui *website* Sragen, Pemda Kabupaten Sragen berusaha memenuhi aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal, serta tuntutan demokratisasi semakin transparannya akses informasi. Sehingga dapat mewujudkan penyampaian informasi yang mudah untuk diakses dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan penyampaian informasi yang mudah diakses tersebut diharapkan pula adanya umpan balik dari masyarakat akan kebijakan institusi, baik yang sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan, ataupun yang sedang diusulkan. Dengan adanya komunikasi dua arah ini, sehingga dapat mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan masyarakatnya.

E-Government

E-Government didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dimana pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Indrajit, 2002 : 22).

Pemerintahan elektronik (juga disebut *egov*, *digital government*, *online government* atau *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang

berkenaan dengan pemerintahan. *e-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan.

Penerapan *e-government* dimaksudkan untuk mempercepat proses interaksi antara Pemerintah dengan masyarakat di mana pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menghidupkan aktivitas masyarakat guna mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik, serta berfungsi menjadi portal informasi, interaksi, dan transaksi bagi Pemerintah dengan masyarakat maupun pihak-pihak lain. (Indrajit, 2002:32)

Ruang lingkup dari implementasi *e-government* yaitu (1) pembangunan teknologi berbasis internet guna menambah akses memberikan pelayanan jasa dari pemerintah kepada masyarakat, (2) Keterhubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai informasi/ memperoleh pelayanan dari pemerintah, (3) Keterhubungan elektronik dilingkungan internal maupun eksternal untuk berbagai aplikasi.

Adapun tujuan *e-government* ini adalah sebagai berikut : (1) Terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah. (2) Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah dan lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini. (3) Menunjang *good government* dan keterbukaan. (4) Meningkatkan pendapatan asli daerah. (Anwar, Oetoyo, 2004;66)

Egov juga diterapkan di Pemda kabupaten Sragen. Pemda Kabupaten Sragen telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah menyediakan *website* Pemda Sragen yang dapat menciptakan hubungan secara cepat, efektif dan efisien antara pemerintah dengan masyarakatnya. Diharapkan dengan penerapan *egov* dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga tercipta

kesejahteraan bagi masyarakat Sragen.

Pembahasan

Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Pemerintah Kabupaten Sragen telah menerapkan *e-government* dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya. Pemerintah telah menyiapkan fasilitas *online* dan diharapkan adanya interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakatnya dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Salah satu bentuk penerapan *e-government* adalah dengan dibentuknya *website* yang beralamat di www.sragenkab.go.id. *Website* yang resmi dibentuk pada tahun 2002 ini, bertujuan untuk menampilkan berita tentang kegiatan Pemerintah Kabupaten Sragen setiap hari (*daily news*), menampilkan berita tentang dinamika masyarakat Kabupaten Sragen dan menampilkan segenap potensi yang ada di Kabupaten Sragen. Dengan hadirnya *website* pemda, dapat memudahkan pemerintah menginformasikan segala sesuatunya kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat pun dapat mengakses dengan mudah mengenai informasi-informasi yang diperlukan. Sehingga aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal serta semakin besarnya tuntutan demokratisasi dan semakin transparannya akses informasi dapat terpenuhi. Hal ini semata-mata bertujuan agar pemerintah daerah tetap mendapatkan kredibilitasnya.

Humas Kabupaten Sragen memiliki peranan dan wewenang yang besar dalam pengelolaan isi informasi yang dimuat dalam *website*, karena humaslah yang memiliki tugas secara penuh dalam proses pengelolaan informasi yang dimuat dalam *website*. Ini sesuai dengan tugas humas yaitu pelayanan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang informasi dan kehumasan. Untuk menghasilkan informasi yang selalu *up-date* bagi masyarakat, humas telah melakukan beberapa tahapan yaitu humas setiap harinya melakukan liputan untuk mendapatkan sumber berita sebagai bahan pembuatan berita. Sumber berita yang telah di dapat nantinya akan

diolah menjadi berita yang menarik dan enak untuk dibaca.

Pemda kabupaten Sragen dalam pengelolaan isi informasi *website* sudah dilakukan secara sistematis. Pemerintah telah menyediakan fasilitas *online* untuk memudahkan masyarakat melakukan komunikasi dengan pemerintahnya dalam hal ini humas sudah melaksanakan perannya sebagai fasilitator. Namun masyarakat menanggapi lain, kurang adanya respon dari masyarakat dengan hadirnya *website* ini. Masyarakat kurang berpartisipasi aktif, masyarakat memanfaatkan *website* masih sebatas untuk mencari informasi.

Komunikasi yang terjalin melalui *website* cenderung masih berjalan satu arah, dimana humas menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sedangkan komunikasi dua arah belum terlaksana secara optimal. Hal ini ditandai masih banyaknya masyarakat yang belum mengenal *website* Sragen, dilihat dari jumlah kritik dan saran pun masyarakat kurang aktif untuk ikut berpartisipasi melalui media komunikasi yang sudah disediakan pemerintah secara *online*. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh fakta bahwa masih banyak dari masyarakat Sragen yang belum mengenal *website* Sragen. Hal ini disebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses internet, sehingga masyarakat merasa kurang efektif, juga dikarenakan karena masyarakat memang tidak tahu pemerintah menyediakan *website* resmi Pemda Sragen.

Untuk lebih menyadarkan masyarakat akan kemudahan penggunaan media *online* dibutuhkan partisipasi dari pemerintah untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga hubungan komunikasi yang di harapkan dapat tercipta yaitu hubungan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anwar, M Khoirul dan Asianti Oetoyo S., 2004, *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintah di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Chotimah, Ade Chusnul., 2003, *Penggunaan Website Sebagai Media Humas (Studi Pada Website Pemerintah Kota*

- Yogyakarta dan Website Pemerintah Propinsi Daerah Yogyakarta*). Skripsi UPN "Veteran" Yogyakarta
- Cutlip, Center, Broom, 1985, *Effective Public Relations 6th Edition*. Prentice Hall, Inc, new Jersey.
- Effendy, Onong Uchjana, 2002, *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Heath, Robert Lawrence, W. Timothy Coombs, 2006, *Today's Public Relations, Introduction*, California
- Indrajid, Richardus E., 2002, *Electronic Government*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Moore, Frazier. H., 1993, *Hubungan Masyarakat*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Rachmadi, F., 1993, *Publik Relation Dalam Teori Dan Praktek*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Sumber lain : www.sragenkab.go.id